

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam analisis makroekonomi yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari periode ke periode atas dasar harga konstan, yang mencerminkan kenaikan volume produksi riil barang dan jasa. Indikator ini tidak hanya mencerminkan peningkatan output ekonomi secara kuantitatif, tetapi juga menjadi ukuran kemampuan suatu daerah dalam menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan.

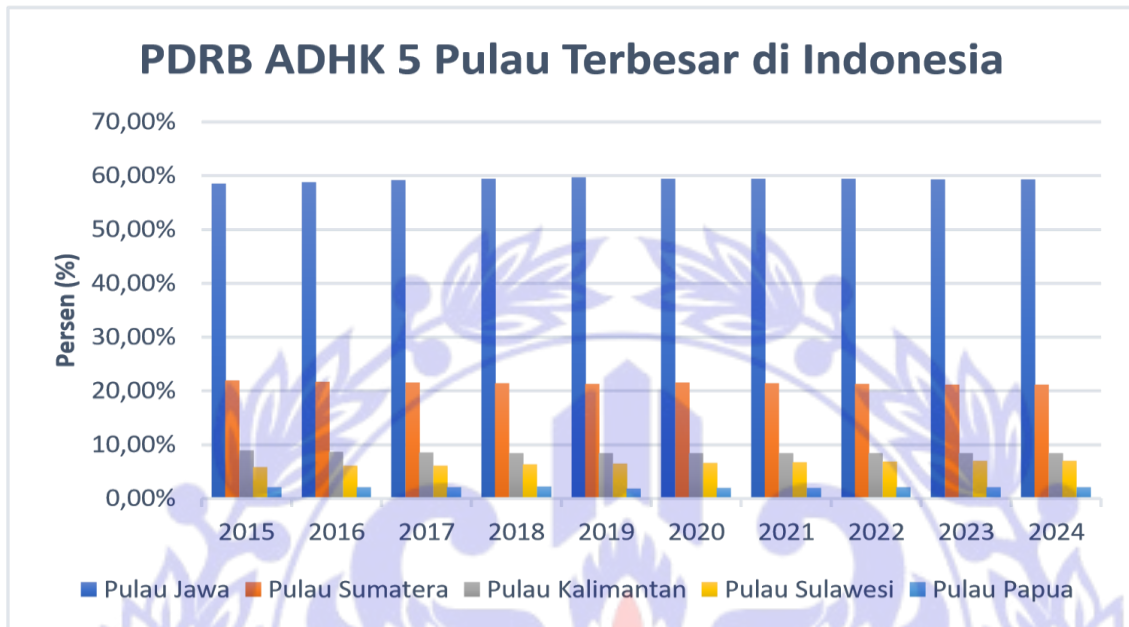
Namun demikian, tingginya angka PDB atau PDRB tidak selalu mencerminkan keberhasilan pembangunan secara menyeluruh. Bappenas (2023) menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, di mana manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dimensi kualitas pertumbuhan, seperti distribusi pendapatan dan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, juga menjadi aspek penting dalam menilai kemajuan suatu daerah.

Dalam kajian literatur ekonomi, Todaro dan Smith (2020) mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kapasitas jangka panjang suatu wilayah dalam memproduksi berbagai barang dan jasa, yang didukung oleh perkembangan teknologi, akumulasi modal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Senada dengan itu, Mankiw (2021) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan hasil interaksi antara faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, dan produktivitas total, yang secara kolektif mendorong output nasional.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan nasional, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Kuncoro, 2022). Selain itu, pertumbuhan yang stabil juga memperkuat daya saing suatu negara atau daerah dalam perekonomian global (World Bank, 2023).

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki struktur ekonomi yang sangat beragam antar pulau. Kontribusi antarwilayah terhadap PDB nasional menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan. Berdasarkan data PDRB ADHK lima pulau terbesar

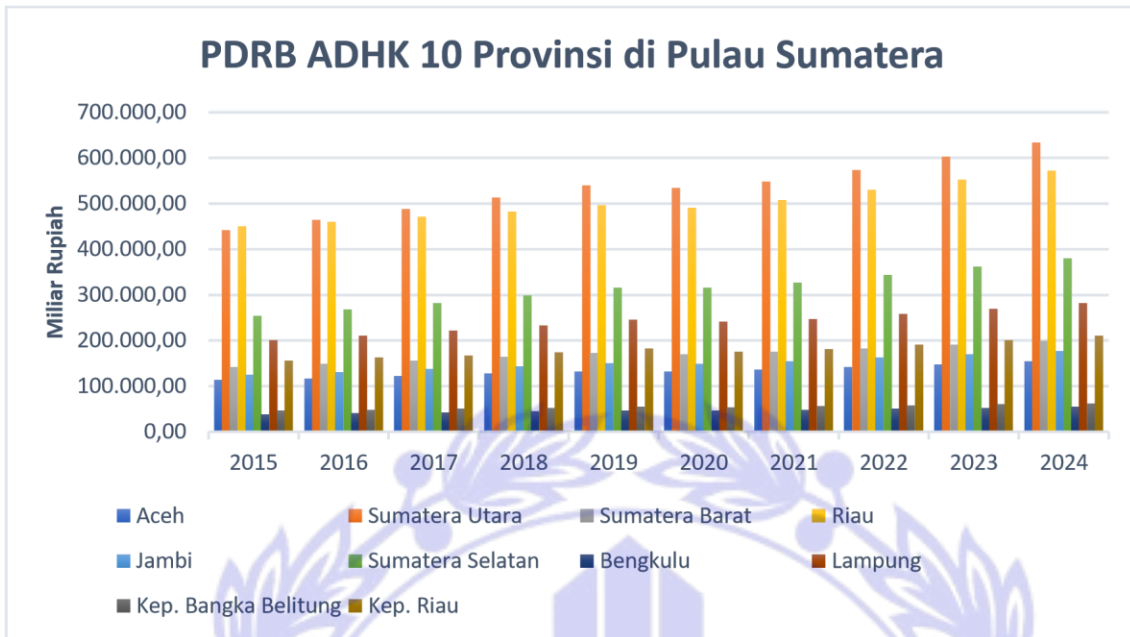
di Indonesia periode 2015–2024, Pulau Jawa konsisten mendominasi perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 58–60%, sementara pulau-pulau lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua menunjukkan kontribusi yang jauh lebih rendah.



Gambar 1.1 Produk Domestik Bruto ADHK

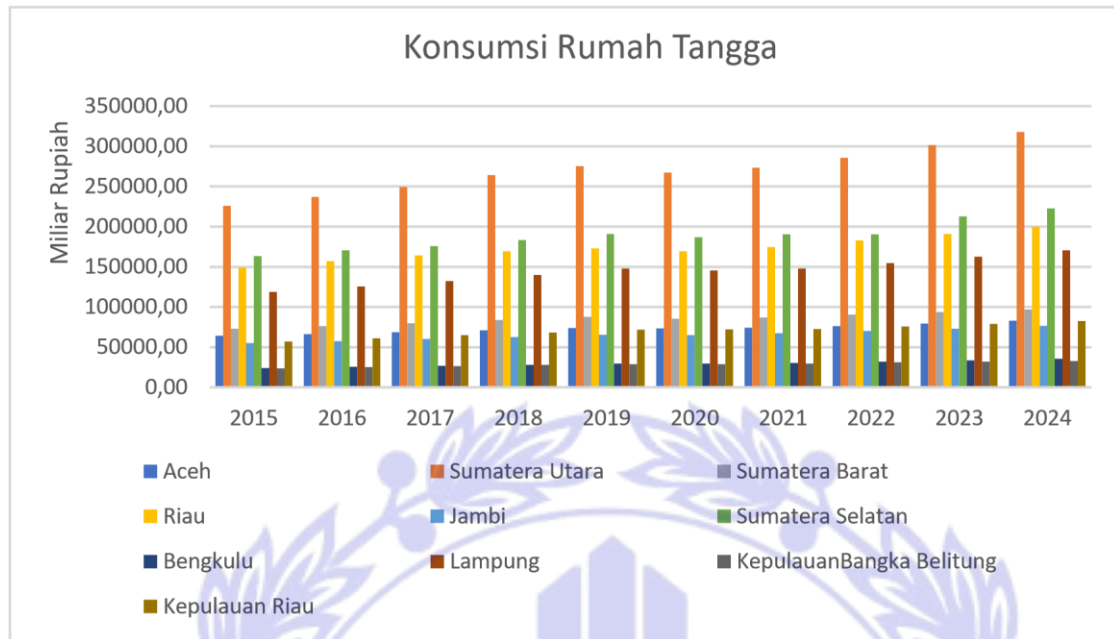
Sumber: Badan Pusat Statistika, 2025 (diolah)

Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa Pulau Jawa secara konsisten menjadi kontributor terbesar. Pada tahun 2015 kontribusi PDRB Pulau Jawa mencapai 58,47 persen terhadap PDB nasional. Sementara itu, Pulau Sumatera menempati posisi kedua dengan kontribusi 21,83 persen pada tahun 2015. Sampai dengan tahun 2022 Pulau Sumatera memiliki kontribusi PDRB terbesar kedua setelah Pulau Jawa yaitu sebesar 21,05 persen. Meskipun kontribusi Sumatera relatif besar, angka tersebut tampak stagnan bahkan menurun dalam satu dekade terakhir. Fakta ini menimbulkan pertanyaan terkait faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera yang belum optimal berkembang dibanding Pulau Jawa. tren kontribusi Pulau Sumatera yang relatif stagnan, sehingga memunculkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera.



Gambar 1. 2 Produk Domestik Regional Bruto ADHK 10 Provinsi di Pulau Sumatera
Sumber: Badan Pusat Statistika, 2025 (diolah)

Pada gambar 1.2 diatas menunjukkan disparitas ekonomi yang lebih terlihat dimana Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan mendominasi dengan nilai PDRB mendekati Rp500 triliun pada 2024. Sebaliknya, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Jambi mencatat PDRB jauh lebih rendah dan stagnan yaitu hanya mencapai 170 triliun. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antarprovinsi, yang jika dibiarkan, akan memperlebar jurang kesejahteraan (Kuncoro, 2022). Konsumsi rumah tangga menjadi komponen signifikan dalam pembentukan PDRB Sumatera.

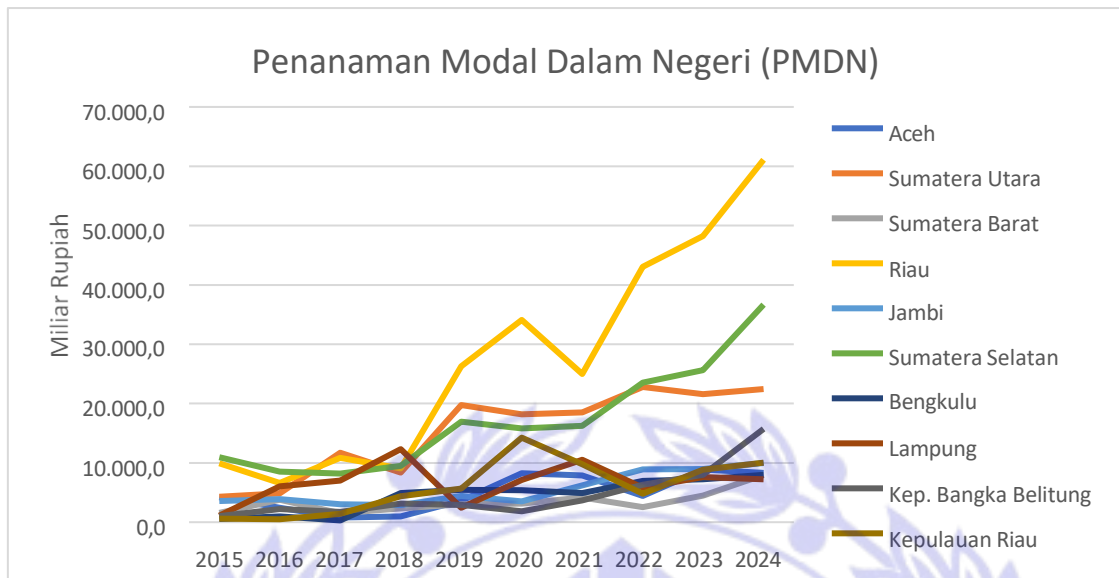


Gambar 1.3 Konsumsi Rumah Tangga

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2025 (diolah)

Pada gambar 1.3 diatas menunjukkan pola konsumsi tinggi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Riau, sedangkan beberapa provinsi seperti Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung mencatat konsumsi rumah tangga yang relative rendah hingga tahun 2024. Rendahnya konsumsi ini dapat disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat, volatilitas harga komoditas, serta dampak pandemi COVID -19 (Bank Indonesia, 2023; Mankiw, 2021). Jika konsumsi rumah tangga menurun, pertumbuhan ekonomi daerah juga berisiko terhambat (Todaro & Smith, 2020).

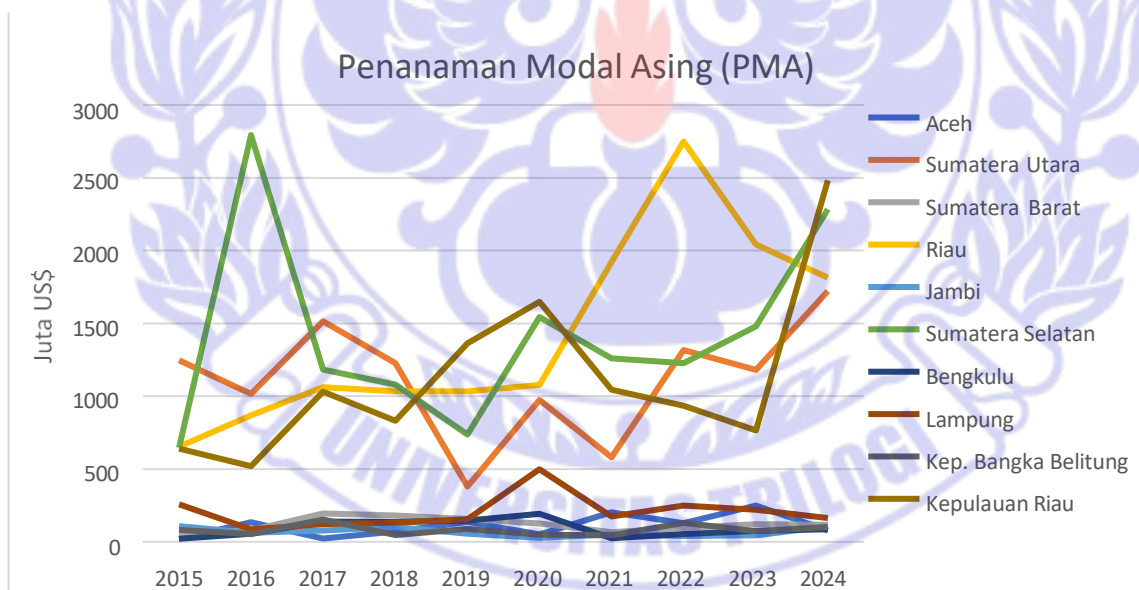
Investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), juga menjadi faktor penting.



Gambar 1.4 Penanaman Modal Dalam Negeri

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2025 (diolah)

Gambar 1.4 diatas menunjukkan lonjakan penanaman modal dalam negeri di Riau dan Sumatera Selatan, sementara provinsi lain seperti Bengkulu dan Jambi tertinggal.



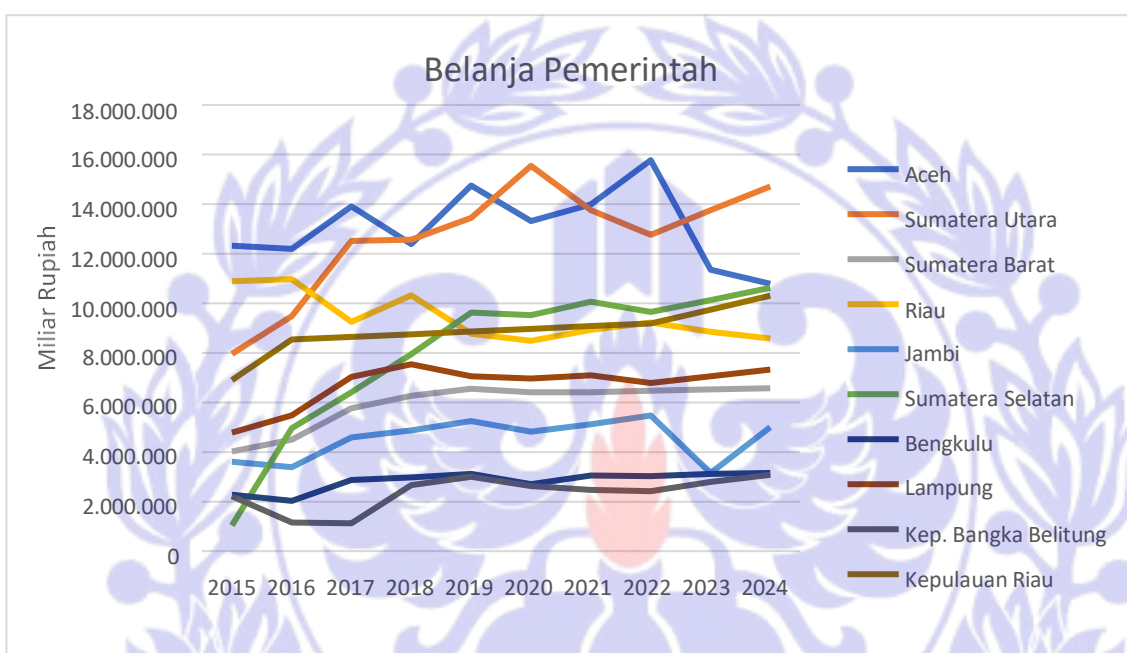
Gambar 1.5 Penanaman Modal Asing

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2025 (diolah)

Gambar 1.5 diatas mencatat lonjakan ekstrem di Sumatera Selatan pada 2016, mencapai USD 2.800 juta, sedangkan provinsi lain stagnan di bawah USD 200 juta.

Ketimpangan distribusi investasi memengaruhi penciptaan lapangan kerja dan kapasitas produksi daerah (Todaro & Smith, 2020).

Belanja pemerintah berperan vital dalam pemerataan pembangunan. Menurut Musgrave dan Musgrave (2019), belanja pemerintah yang tidak merata memengaruhi pemerataan infrastruktur, pelayanan publik, serta kesempatan kerja. Data di Sumatera menunjukkan konsentrasi belanja di provinsi-provinsi besar seperti Sumatera Utara dan Sumatera Selatan (Bappenas, 2023)



Gambar 1.6 Belanja Pemerintah

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2025 (diolah)

Grafik pada Gambar 1.6 di atas menunjukkan perkembangan belanja pemerintah di sepuluh provinsi Pulau Sumatera pada periode 2015–2024. Secara umum, tren belanja pemerintah cenderung meningkat dari tahun ke tahun, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa periode. Peningkatan tertinggi terlihat di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh, sementara provinsi dengan belanja relatif rendah antara lain Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu. Penurunan sempat terjadi pada beberapa provinsi sekitar tahun 2021 yang kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, namun setelah itu kembali menunjukkan kenaikan. Data ini mencerminkan adanya peran penting belanja pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera. Berbagai penelitian terdahulu menegaskan pentingnya variabel konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi mayoritas dilakukan pada wilayah yang berbeda atau lingkup terbatas.

Supartawan dan Saskara (2021) menemukan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga, pendidikan, dan investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Bali. Sementara itu, Utomo et al. (2024) meneliti pengaruh konsumsi, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor neto terhadap PDRB Surabaya. Mereka menemukan konsumsi berpengaruh positif signifikan, sedangkan belanja pemerintah dan investasi tidak signifikan secara parsial, meski signifikan secara simultan.

Dumais (2022) di Kabupaten Minahasa juga menemukan bahwa investasi, tenaga kerja, dan belanja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Yuliani et al. (2024) menunjukkan PMA, rasio pajak, dan ekspor neto berpengaruh positif terhadap PDB Indonesia. Studi-studi ini mengonfirmasi bahwa variabel konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah seringkali menjadi variabel kunci, meski signifikansinya berbeda-beda tergantung wilayah dan periode pengamatan. Namun demikian, hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara komprehensif menguji pengaruh konsumsi rumah tangga, investasi PMDN dan PMA, serta belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi secara simultan di 10 provinsi Pulau Sumatera menggunakan data panel periode panjang 2015–2024.

Jika ketimpangan kontribusi konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah tidak segera diidentifikasi secara empiris, maka risiko pertumbuhan ekonomi yang timpang akan semakin tinggi, memicu migrasi tenaga kerja, penurunan kualitas hidup, serta melemahnya daya saing ekonomi daerah (Todaro & Smith, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data panel, yang dinilai paling tepat karena mampu menangkap dinamika waktu sekaligus heterogenitas antarprovinsi (Gujarati & Porter, 2020; Baltagi, 2021).

Penelitian ini dibatasi pada 10 provinsi di Pulau Sumatera dalam periode 2015–2024, dengan fokus variabel konsumsi rumah tangga, investasi PMDN dan PMA, serta belanja pemerintah. Variabel lain seperti ekspor-impor, inflasi, dan pengangguran tidak dianalisis agar fokus penelitian tetap tajam. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan di Pulau Sumatera.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan konsumsi rumah tangga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 10 Provinsi Pulau Sumatera selama periode 2015-2024?
2. Apakah pertumbuhan investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 10 Provinsi Pulau Sumatera selama periode 2015-2024?
3. Apakah pertumbuhan belanja pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 10 Provinsi Pulau Sumatera selama periode 2015-2024?
4. Apakah pertumbuhan konsumsi rumah tangga, pertumbuhan investasi dan pertumbuhan belanja pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 10 Provinsi Pulau Sumatera selama periode 2015-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi di 10 provinsi Pulau Sumatera selama periode 2015-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di 10 provinsi Pulau Sumatera selama periode 2015-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di 10 provinsi Pulau Sumatera selama periode 2015-2024.
4. Untuk menguji pengaruh simultan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, pertumbuhan investasi, dan pertumbuhan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di 10 provinsi Pulau Sumatera dalam rentang waktu 2015-2024 dengan pendekatan analisis data panel.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah provinsi di pulau sumatera, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menurut 10 Provinsi di Pulau Sumatera.
2. Bagi peneliti lainnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

